

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PALA DI KABUPATEN FAKFAK

Albertus Dogopia

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

email: albertusdogopia@gmail.com

Paper Accepted: 05 Juni 2017
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017
Paper Edited: 03-15 Juli 2017
Paper Approved: 20 Juli 2017

ABSTRACT

As for the aspects of the study related to the government's role in the empowerment of farmers nutmeg in Fakfak includes six aspects of how to understand the aspirations of the people, how to build popular participation, prepare the community with better, open a dialogue with the community, open lines of information and necessary access, creating regulatory instruments and a mechanism for setting the qualitative assessment method with survey-descriptive approach. Collecting data through interviews, documentation and observation techniques and analysis menghubungkan third test data by categories defined by the existing theories. The results showed that the role of local government to the six aspects Fakfak is not maximized in empowering farmers nutmeg. This condition is measured from the unfulfilled aspects of the study based on the analysis. As a recommendation, the local government Fakfak need to improve these aspects to be able to empower farmers in Fakfak nutmeg, mace so that commodities can actually be a source of income in improving the socio-economic life of farmers and could contribute Fakfak PAD.

Keywords: Empowerment; Farmers

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Potensi besar sumberdaya manusia Indonesia dan sumberdaya alam ternyata tidak dapat menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat dan mengangkat martabat bangsa yang dewasa ini cukup memprihatinkan. Harus ada perubahan dalam memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang sekarang ini.

Jumlah petani pala pada tahun 2012 mencapai 10.264 kepala keluarga atau sekitar 62% dari total kepala keluarga (16.555) di kabupaten fakfak yang rata-rata terdiri dari 4-5 orang anggota keluarga. (sumber : kabupaten fakfak dalam 2014:51). Sementara penghasilan petani pala permasa panen antara 10 juta rupiah sampai 12,5 juta rupiah (panen dilakukan 2 kali dalam

setahun) berarti penghasilan petani pala per satu tahun antara 20 juta rupiah hingga 25 juta rupiah, sehingga rata-rata penghasilan perbulan petani pala hanya sekitar 1,7 juta rupiah hingga 2,1 juta rupiah per kepala keluarga, dengan 4-5 anggota keluarga tentu sangat memprihatinkan. Rata-rata penghasilan petani tersebut belum termasuk pemotongan hutang petani kepada para pedagang yang rata-rata 5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per masa panen jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup minimum Kabupaten Fakfak 747.792 tentu sangat menyedihkan (sumber : Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak 2014:69)

Kondisi ini telah berlangsung lama, faktor – faktor yang menghambat peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil panen pala lebih disebabkan oleh terjebaknya para petani

oleh spekulan pedagang pala yang juga secara turun temurun telah menguasai lalu lintas perdagangan pala antar daerah.

Pedagang pala antar daerah didominasi oleh para pendatang dari berbagai suku di tanah air. Yang sejak dahulu menjadi perantara ke berbagai wilayah di Indonesia maupun luar negeri. Mereka yang telah berdomisili sebagai penduduk pendatang di Kabupaten Fakfak

adalah pemilik gudang – gudang penampungan pala dengan menguasai sektor perekonomian dan perdagangan lokal di ibu kota kabupaten disamping beberapa pendatang musiman yang juga memiliki peran sebagai pengumpul dan pembeli pala dalam skala kecil. Sementara masyarakat asli hanya petani biasa dan pemilik kebun – kebun pala yang menjual seluruh hasil panen kepada pedagang pala antar daerah di lokasi perkebunannya.

Tabel 1
Luas Areal dan Produksi Pala di Kabupaten Fakfak Menurut Distrik
Tahun 2014

No	Distrik	Luas Area	Produksi
1	Fakfak Barat	706,50	219,61
2	Fakfak Timur	1.178,00	156,22
3	Fakfak	524,24	151,47
4	Kokas	554,05	165,81
5	Karas	483,70	22,10
6	Fakfak Tengah	794,00	166,50
7	Kramongmongga	953,00	186,75
8	Teluk Patipi	1.535,33	185,10
9	Bomberay	-	-
Jumlah		6728,82	1253,56

Sumber : BPS Kabupaten Fakfak, 2014

Secara umum kabupaten fakfak memiliki luas 14.320 Km², sedangkan total luas area tanaman perkebunan rakyat di kabupaten fakfak adalah seluas 12.103,83 Ha (sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak). Sebagian besar areal perkebunan rakyat di penuhi tanaman pala yang dengan luas areal 6728,82 Ha (sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak 2014:200).

Petani pala tradisional yang menjual hasil panennya kepada pedagang antar daerah seharusnya dapat juga menikmati keuntungan yang berimbang, tetapi realita yang terjadi sangat jauh berbeda, karena sebelum masa panen petani pala telah terikat hutang dengan spekulan maupun pedagang antar daerah. Sehingga hasil panen hanya dipakai sebagai nilai tukar hutang yang secara ekonomi tidak dapat disebut sebagai transaksi penjualan atau pembelian lebih tepat disebut sebagai barter. Kebanyakan petani pala sebelum masa penen mengambil kebutuhan sehari – hari dengan berhutang kepada spekulan yang hampir sebagian memiliki toko – toko dan warung di sekitar perkebunan. Kebiasaan berhutang pada pemilik toko telah berlangsung secara turun temurun sehingga telah dianggap sebagai kebiasaan yang wajar. Barang – barag yang biasa di hutang mulai dari sembilan bahan pokok, sandang sampai barang elektronik juga sejumlah uang untuk kebutuhan sekolah anak –

anak dan juga hajatan seperti pesta pernikahan dan sunatan. Ketergantungan petani tertentu kepada pedagang dan spekulan tertentu juga diwariskan dari orang tua kedua belah pihak dari masa sebelumnya. Hubungan kedua pihak secara sosial budaya berlangsung baik hanya saja secara ekonomi petani lokal yang sekaligus pemilik perkebunan pala sangat dirugikan.

Kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Fakfak terhadap komoditi ini menyebabkan kelambanan kebijakan yang mengatur tentang tata niaga pala yang berimplikasi pada ketidakberdayaan petani, karena penguasaan pasar yang sepihak oleh pedagang yang tidak memberikan keleluasaan petani untuk mendapatkan pasar dan harga yang baik. Kondisi ini telah memotivasi penulis untuk melihat bagaimana **“Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Pala di Kabupaten Fakfak”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, beberapa masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya strategi pemerintah yang tepat dalam melindungi hak – hak petani lokal dalam memasarkan hasil panennya dari penguasaan para spekulan dan

pedagang antar daerah yang telah berlangsung turun temurun.

2. Potensi perkebunan pala di kabupaten fakfak belum dijadikan sebagai komoditi unggulan dalam meningkatkan taraf hidup pendapatan petani pala.
3. Masih adanya kebiasaan dan tradisi budaya lokal kehidupan yang menghambat kemajuan petani pala dalam mengemas dan memasarkan hasil panen.
4. Standar harga dari hasil panen yang dijual petani pala setiap tahunnya tidak tetap karena di atur oleh spekulasi (pelaku pasar yang mencari keuntungan besar dalam perniagaan pada pasar komoditi)
5. Kurangnya dialog yang dilakukan pemerintah daerah dengan masyarakat khususnya kelompok petani pala.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak ?
2. Hambatan – hambatan apa yang ditemukan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan petani pala di Kabupaten Fakfak ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di kabupaten Fakfak ?

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Uswanas (2003 : 35) memfokuskan penelitiannya pada pengembangan kelompok tani, program kemitraan dan ketersediaan sarana prasarana. Kajian penelitian melalui metode survei deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Fakfak belum optimal dalam melakukan program pemberdayaan terhadap petani pala. Sebagai rekomendasi pilihan kebijakan oleh peneliti kepada pemerintah Kabupaten Fakfak adalah pembenahan aspek – aspek pemberdayaan yang menjadi fokus penelitian ini sehingga komoditas pala dapat menjadi sumber penghasilan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi petani dan dapat menjadi salah satu sumber kekayaan dalam menambah anggaran pembangunan daerah.

Konsep Peranan Pemerintah

Pemerintah adalah penyelenggara dari negara, seperti banyak tercantum dalam teori mengenai negara, unsur – unsur suatu negara umumnya terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan.

Dalam konteks negara ataupun pemerintahan, Hobbes dalam McIver, (1992 : 29) mengatakan bahwa *“Pemerintahan adalah yang lebih baik diantara dua hal yang buruk, yaitu sesuatu yang terpaksa digunakan manusia untuk dapat lari dari keadaan alami yang tidak menyenangkan dan tak menentu. Pemerintahan merupakan sesuatu yang merampas kemerdekaan mereka dan mengekang segala nafsu dan keinginan alami mereka”*.

Pelaksanaan pemerintahan haruslah diprioritaskan dan diorientasikan untuk maksud kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi pelayanan civil dan publik, termasuk penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan oleh aparatur yang disebut dengan birokrasi. Dalam terminologi ini yang disebut oleh (Rasyid, 1999 : 14) sebagai pemerintahan memiliki *power* yang cukup, yang dinyatakan : *“Tetapi, pelayanan yang baik melalui kemampuan optimal untuk melaksanakan tugas – tugas pokok yang dikemukakan di atas, hanya mungkin diwujudkan hanya jika pemerintahan memiliki power yang cukup. Disini pemerintahan yang kuat jelas diperlukan, dengan catatan kekuatan itu akan memberinya semacam independensi untuk mengutamakan pelayanan dan perlindungan kepada kelompok – kelompok masyarakat yang paling lemah posisinya dalam masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, budaya, maupun politik”*.

Tugas – tugas pemerintah itu menurut Rasyid (1999 : 48) dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Sejak orde baru, pemerintahan Indonesia telah bergiring untuk menjadikan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang

menjadi acuan dari semua kebijakan pemerintahan. Karena itu, pemerintah mengambil peran sebagai agen utama dari pembangunan nasional.

Otonomi Khusus Papua

Pemberian otonomi khusus Pemerintah Provinsi Papua dapat mengambil prakarsa sendiri dalam menetapkan langkah – langkah dan perencanaan strategi dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang Papua merupakan hakekat implementasi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001. Hal ini dapat dilihat pada 4 (empat) program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi rakyat dan program insraktur. Rencana Strategi Pemerintah Provinsi Papua dimuat dalam Peraturan Daerah Provnsi Papua Nomor 7 Tahun 2002 kerja Visi Pemerintah Provinsi yaitu “Memiliki Landasan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik yang kuat bagi terwujudnya masyarakat Papua menjadi tuan di negeri sendiri”.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rappaport dalam Harry, (2006:3) pemberdayaan diartikan sebagai “pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak – haknya menurut undang – undang”. Selanjutnya Rappaport dalam Hary, (2006:12) mengatakan bahwa “praktek yang berbasisakan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam simbol – simbol yang mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal – hal yang terkandung dalam diri dan orang lain yang kita anggap penting serta masyarakat sekitar”.

Hanna dan Robinson (dalam Harry, 2006:19) mengemukakan ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam perubahan , yaitu :

1. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.
2. Strategi *direc-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang di hormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi.
3. Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum

pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kajian yang berkenaan dengan metode – metode yang dipakai dalam suatu proses kegiatan penelitian. Merujuk pada makna etimologis, Rusidi (2002:1) membatasi pada pemikiran bahwa :Kata metode yang dapat diartikan sebagai cara berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir (teknik) guna melakukan suatu pekerjaan secara lebih baik dalam mencapai tujuannya (secara efektif). Sedangkan kata penelitian diartikan sebagai suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan metode – metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis, yang bertujuan menemukan, ilmu dan teknologi, yang berguna baik bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna laksana atau praktis.

Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diselidiki langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian dan terjaring atau diperoleh pertama sekali dari objek sumber data atau pihak pertama secara langsung berupa pendapat pribadi yang subjektif maupun hasil pengamatan dimana sifatnya belum pernah diolah atau dipublikasikan. Data primer kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik diatas dilakukan oleh peneliti sendiri serta atau memanfaatkan petunjuk (informasi) dari informan.

Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah para informan yang didukung dengan dokumen berupa naskah, data tertulis. Informan sebagai sumber data pendekatan kualitatif diperoleh dari semua pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari aparat pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kewenangan pemerintahan yang pertama di tingkat lokal (Bupati Fakfak) dan Dinas teknis serta kantor distrik dan juga kelompok masyarakat petani pala.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi
Peneliti mengadakan pengamatan ke lokasi penelitian sehingga dapat secara langsung melihat permasalahan yang diteliti dengan teknik pengamatan secara tidak langsung.
2. Wawancara
Wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara tak berstruktur berkaitan aktivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan informasi (jawaban keterangan) informan yang memiliki kompetensi, kapabilitas, di samping paham, tahu, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, dengan diyakini ke-independennannya dalam interaksi maupun interelasi atas implementasi program.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan,

dokumen resmi maupun sumber-sumber lainnya bersifat tercatat dan mendiskripsikan secara tertulis maupun gambar/bagan/tabel yang berkaitan dan dianggap perlu untuk mengetahui serta dapat membantu penganalisisan fokus permasalahan penelitian yang dihadapi.

Teknik Analisis

Tahapan penafsiran data dilakukan dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dihubungkan dan diuji dengan kategori yang telah ditetapkan. Sehingga dapat ditafsirkan dengan menghubungkannya pada konsep atau teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan Geografi dan Demografi

Adapun luas komposisi distrik dan ibukota distrik serta luas wilayah setiap distrik dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Komposisi Distrik dan Luas Wilayah Masing-masing Distrik

No	Distrik	Ibukota	Luas Km2
1	Fakfak Barat	Werba	1.685
2	Fakfak Timur	Weri	1.721
3	Fakfak	Dulan Pokok	820
4	Fakfak Tengah	Raduria	705
5	Karas	Malakuli	2.491
6	Kokas	Kokas	1.786
7	Kramongmongga	Kramongmongga	1.478
8	Teluk Patipi	Patipi Pasir	1.724
9	Bomberay	Onim Sari	1.910
Luas			14.320

Sumber : Kabupaten Fakfak dalam angka 2014

Distrik karas merupakan daerah yang terluas dikabupaten fakfak dengan luas wilayah 2.491 Km2. Sedangkan dsitrik fakfak tengah merupakan daerah yang terkecil yaitu 705 Km2

atau 4,92% dari total luas Kabupaten Fakfak. Kabupaten dengan ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut merupakan kota tertinggi dan terdingin di papua barat.

Tabel 3
Jumlah dan Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Distrik dalam Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun 2014

No	Distrik	Jumlah (Jiwa)			Rumah tangga
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Fakfak Barat	2.480	2.365	4.845	1.058
2	Fakfak Timur	1.573	1.566	3.139	775
3	Fakfak	15.345	14.457	29.802	6.521
4	Kokas	3.055	2.135	5.190	1.635
5	Karas	4.075	1.897	5.975	1.317

6	Fakfak Tengah	6.739	6.069	12.808	2.462
7	Kramongmongga	1.653	1.448	3.101	684
8	Teluk Patipi	2.024	1.917	3.941	934
9	Bomberay	1.739	1.476	3.215	1.169
Jumlah		38.686	33.330	72.016	16.555
Persentase		53,72%	46,28%		

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Fakfak tahun 2014

Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi

Keadaan Sosial Budaya

Pluralisme etnis dan agama sangat mengakar di Kabupaten Fakfak. Dalam kehidupan masyarakat setempat selama ratusan tahun, Islam dan Kristen sudah berbaaur menjadi satu. Tak ada pertentangan antara penganutnya meskipun kedua keyakinan tersebut masuk ke Fakfak hampir bersamaan. Kapitan Ambar yang memerintah antara 1965 – 1974 adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar kerukunan di Fakfak. Ia selalu menyampaikan kepada masyarakat mengenai kerukunan, kebersamaan dan persaudaraan.

Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian makro kabupaten fakfak pada saat ini ditunjukkan melalui beberapa variabel antara lain : nilai PDRB, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan per-kapita, dan Laju investasi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten fakfak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2010 – 2015 sebesar 5,16% per tahun. Sebagian besar penduduk adalah petani, nelayan dan pedagang.

Untuk tanaman jenis buah-buahan banyak terdapat di hampir semua distrik. Buah pisang banyak dihasilkan dari Distrik Fakfak Timur dan Karas. Sedangkan buah alpukat banyak terdapat di Distrik Fakfak. Untuk jenis rambutan, nanas, jambu biji, pepaya dan belimbing banyak terdapat di Distrik Fakfak, Fakfak Tengah, dan Kramongmongga. Durian hampir ada disemua distrik kecuali Karas dan Bomberay. Nangka banyak dihasilkan dari

Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Fakfak, Kokas, dan Kramongmongga.

Dari sisi perkebunan dapat digambarkan sebagai berikut : perkebunan kelapa banyak terdapat di Fakfak Timur, Kokas, Fakfak Tengah dan Teluk Patipi. Sedangkan kakao banyak terdapat di Fakfak Barat dan Kramongmongga, cengkeh di Fakfak Tengah, jambu mete terdapat di Fakfak Barat, Fakfak Timur, dan Kokas, sedangkan tanaman kopi terdapat di Kokas dan Teluk Patipi.

Gambaran Sistem Pemerintahan Kabupaten Fakfak

Kondisi Kabupaten Fakfak saat ini, secara administratif terbagi menjadi 9 distrik, 5 kelurahan, dan 104 kampung. Sistem pemerintahan yang dijalankan sama seperti sistem pemerintahan daerah lain pada umumnya di Indonesia dimana saat ini Kabupaten Fakfak dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Untuk penyebutan wilayah administratif setingkat dibawah kabupaten berbeda dari yang lainnya di luar Papua. Untuk kecamatan disebut dengan distrik sedangkan untuk desa disebut dengan kampung. Adapun hal ini dilakukan sebagai dampak dari adanya Undang – undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membagi wilayah teritorial pemerintahan dengan nama sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Untuk itu penyebutan tersebut diatas digunakan untuk wilayah Papua.

Selanjutnya untuk dapat melihat gambaran sistem pemerintahan di kewilayahan yang di dukung dengan distrik dan kampung dan dapat diuraikan dengan penampilan jumlah kampung beserta luas wilayahnya sebagai berikut :

Tabel 4
Luas Wilayah dan Jumlah Kampung Setiap Distrik di Kabupaten Fakfak

No	Distrik	Luas (ha)	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan
1	Fakfak Barat	1.685	8	-
2	Fakfak Timur	1.721	13	-
3	Fakfak	820	8	3
4	Fakfak Tengah	705	11	1
5	Karas	2.491	7	-
6	Kokas	1.786	18	1

7	Kramongmongga	1.478	14	-
8	Teluk Patipi	1.724	16	-
9	Bomberay	1.910	9	-

Sumber : data sekunder penelitian dari kabupaten fakfak dalam angka 2014

Gambaran kondisi wilayah setiap distrik yang tergambar dari jumlah kampung dan jumlah kelurahan serta luas wilayah diatas menunjukkan bahwa distrik kokas yang paling banyak memiliki jumlah pemerintahan kampung yang terbentuk sebanyak 18 di tambah dengan kelurahan sedangkan distrik karas merupakan distrik yang paling sedikit memiliki jumlah pemerintahan kampung dengan jumlah sebanyak 7 kampung. Jika di banding dengan luas wilayah yang ada sesungguhnya terlihat sangat kontradiktif karena distrik dengan luas wilayah paling banyak tetapi juga memiliki jumlah pemerintahan kampung yang paling sedikit. Namun hal ini disebabkan oleh sebaran

penduduk dan kondisi masyarakat dalam kesukuan yang ada.

Karakteristik Informan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab iii, bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat pemerintah kabupaten fakfak yaitu aparat dinas kehutanan dan perkebunan dan juga aparat dinas perindustrian dan perdagangan serta aparat pada kantor distrik, kelompok tani serta tokoh masyarakat.

Deskripsi umum tentang informan penelitian ini sebagaimana terdapat pada tabel 5

Tabel 5
Komposisi Karakteristik Informan Penelitian

No	Jabatan	Orang	Pekerjaan	Pendidikan
1	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3	PNS	S1
2	Dinas Perindag	3	PNS	S1
3	Distrik Fakfak Barat	2	PNS	S1
4	Distrik Fakfak Timur	2	PNS	S1
5	Distrik Fakfak	2	PNS	S1
6	Distrik Fakfak Tengah	2	PNS	S1
7	Distrik Karas	2	PNS	S1
8	Distrik Kokas	2	PNS	S1
9	Distrik kramongmongga	2	PNS	S1
10	Distrik Teluk Patipi	2	PNS	S1
11	Distrik Bomberay	2	PNS	S1
12	Kelompok Tani	18	Petani	SMP
13	Tokoh Masyarakat	18	Petani	SMA
Jumlah		60		

Sumber : data primer hasil penelitian dan observasi mei 2016

Pelaksanaan Progam Pemberdayaan Masyarakat Petani Pala di Kabupaten Fakfak

Program pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan ketahanan pangan masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Pembangunan ketahanan pangan yang ada masih bersifat pada tataran makro saja pemenuhan pangan pada tingkatan unit masyarakat terkecil masih terkesan terabaikan.

Memahami Aspirasi Masyarakat

Kajian unsur dimaksud, sehubungan upaya pemerintah daerah dalam memahami aspirasi masyarakat khususnya kelompok petani pala dan bagaimana respon pemerintah atau peka terhadap masalah yang dihadapi oleh mereka.

Aspirasi yang harus dipahami dari masalah yang dihadapi erat kaitannya dengan tuntutan perbaikan kesejahteraan. Hal ini fokus pada bagaimana meningkatkan produksi panen pala, memproduksi hasil panen pala dalam bentuk industri kerajinan rumah tangga secara berkualitas dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, menggunakan teknologi yang tepat secara efektif untuk pemanfaatan produksi pala. Logika yang dibangun adalah apabila produksi panen pala meningkat maka sumber bahan mentah hasil olahan dari buah pala menjadi banyak. Selanjutnya sumber bahan mentah yang banyak tersebut diproses melalui teknologi yang tepat secara berkualitas sehingga dapat menghasilkan produk olahan pala dengan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan demikian petani pala dapat menggantungkan harapan hidupnya dari penjualan produk hasil olahan pala tersebut.

Informasi tersebut diatas didukung dengan data hasil wawancara maupun pengamatan secara tidak langsung dilapangan. Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah seorang petani pala dari distrik karas, bapak Thimotius sebagai berikut : *“memang awalnya kami dikumpulkan oleh pemerintah distrik dan aparat dari kabupaten. Kegiatannya cukup bagus namun lama-lama kami melihat dalam penjualan hasil pala kami tersebut banyak ditipu oleh pengepul atau pengusaha yang punya duit banyak. Kalau begitu berarti pemerintah tidak melindungi kami, terus terang kami tidak ada manfaatnya lagi. Akhirnya kami bersepakat dengan teman-teman petani yang lainnya untuk tidak mengikuti kegiatan kumpul-kumpul atau apapun dari pemerintah daerah”*.

Informasi ini didukung pula oleh salah seorang pengurus kelompok tani di distrik fakfak timur, bapak Hassan Amfuang berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut : *“pada dasarnya kita semua maunya pemerintah bisa mengatur lebih baik sehingga tidak ada yang monopoli dalam penjualan dan harga tidak dipermainkan seenaknya saja. Namun kenyataannya selama ini memang kami menjual hanya kepada beberapa orang pengusaha yang ada disini dan terpaksa dengan harga yang kurang memuaskan kami jual, soalnya kami tidak tau kemana harus kami bawa pala kami ini”*.

Dengan demikian maka kegiatan memahami ataupun menjanging aspirasi rakyat khususnya petani pala dengan model temu kelompok tani perlu ada upaya tindak lanjut dari hasil musyawarah maupun kesepakatan sesuai kebutuhan petani. perlu diefektifkan kembali tindakan nyata yang mengakomodir aspirasi rakyat tersebut, sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah. Selain itu perlu ada model lain yang berjalan simultan dengan model temu tani kelompok ini, seperti mendata langsung kegiatan di lapangan atau perkebunan tani yang dimiliki sehingga bisa langsung mendata kebutuhan apa saja yang sangat urgen diperlukan petani.

Membangun Partisipasi Masyarakat

Konsep ideal dalam kaitan dengan upaya membangun partisipasi rakyat disini adalah memberikan sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan

masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri. Prinsip pembangunan yang partisipatif menurut Harry Hikmat (2006:96), rakyat harus menjadi pelaku utama (subyek) dalam pembangunan. Melalui kajian ini, diharapkan masyarakat lokal dapat mengembangkan potensinya tanpa hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro.

Dengan kondisi yang ada maka perlu adanya pergeseran peran pemerintah secara signifikan, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung.

Berkaitan dengan hal diatas, maka dilakukan wawancara terkait peran pemerintah dalam membangun partisipasi rakyat sebagai informasi pendukung diperoleh data dari Bapak Jacob Marungge, seorang petani pala yang sukses sebagai berikut : *“selama ini kami bekerja sendiri, untuk mengolah pala dan juga hasilnya. Paling-paling kami lakukan dengan keluarga yang ada, kebetulan kami disini dikampung ini rata-rata punya hubungan keluarga semua. Kalau petik buah pala kami biasanya bekerja dalam satu kebun dulu baru pindah ke kebun lainnya secara bersama-sama. Tapi memang tidak ada campur tangan dari pemerintah distrik ataupun kabupaten. Setelah hasilpun kami menjualnya ke tempat yang sudah biasa kami jual dikota”*.

Informasi ini menunjukkan masyarakat masih bekerja sendiri tanpa adanya intervensi pemerintah. Masih berdasarkan kebiasaan lama yang merupakan warisan leluhur. Selanjutnya dukungan informasi lain diperoleh dari pengamatan pada distrik lain dan hasil wawancara pada bapak Ahmad Nyobe sebagai berikut : *“kalau kami biasanya mengelola hasil panen pala kami secara sendiri dan memang banyak masalah yang kami temukan. Ia kalau kena penyakit biasanya kami teban karena kami sendiri tidak tau pengobatannya. Dulu pernah kena hama tapi kami bakar dan tidak ada lagi. Masalah lainpun biasanya kami berusaha untuk menyelesaikan dengan kemampuan kami. Iya kami biasanya kalau tidak ada jalan lain lagi terpaksa kamo bakar atau tebang pohon yang sudah mengganggu”*.

Keterangan petani diatas menunjukkan bahwa belum ada peran pemerintah yang masuk pada unsur membangun partisipasi rakyat. Dimana konsep ideal dari unsur tersebut yakni aparat

pemerintah hanya mengambil peran dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri belum terwujud.

Kondisi diatas, memaksa upaya membangun partisipasi masyarakat sesungguhnya harus dimulai dengan intervensi radikal dari pemerintah daerah tentang bagaimana orang bisa hidup dari pala.

Menyiapkan Masyarakat dengan Sebaiknya

Upaya nyata yang dilakukan pertama kali sehubungan dengan menyiapkan masyarakat agar meningkatkan kemampuan pengetahuan adalah membentuk kelompok tani yang berbasis pada para petani pala sendiri. Proses pembentukannya pun harus diserahkan kepada mereka sendiri dengan maksud pemilihan anggota berdasarkan kehendak mereka sehingga adanya kerjasama yang harmonis. Harus diutamakan kepada masyarakat yang secara geografis dalam satu wilayah sehingga memudahkan mereka dalam kordinasi dan interaksi sosial sesama anggota.

Tabel 6
Komposisi Kelompok Petani Pala yang ada Saat Ini

No	Distrik	Jumlah Kelompok
1	Fakfak Barat	4
2	Fakfak Timur	-
3	Fakfak	6
4	Fakfak Tengah	8
5	Karas	3
6	Kokas	3
7	Kramongmongga	2
8	Teluk Patipi	5
9	Bomberay	-
Jumlah Keseluruhan		31

Sumber : data dokumentasi hasil penelitian tahun 2015

Dari tabel 6 diatas terlihat bahwa bahwa hampir semua distrik sudah terbentuk kelompok tani dengan jumlah yang beragam, meskipun demikian masih terdapat dua distrik yang belum memiliki kelompok petani yaitu distrik fakfak timur dan distrik bomberay. Dengan melihat kondisi yang ada maka pemerintah daerah perlu menambah pembentukan kelompok tani pada distrik yang belum ada serta juga pada distrik lain yang dianggap memiliki potensi pala yang besar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program menyediakan masyarakat terutama pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola pala oleh pemerintah kabupaten fakfak

dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi yang ada. Berbagai kendala dan kondisi keterbatasan tersebut, oleh pemerintah daerah dipetakan secara terstruktur sehingga dapat mencapai hasil program pemberdayaan petani pala melalui kegiatan mempersiapkan masyarakatnya secara baik.

Gambar 1
Buah pala dan biji pala hasil olahan



Membuka Dialog dengan Masyarakat

Penting untuk dilakukan karena dialog merupakan sarana yang tepat dalam mendengar dan memberikan informasi yang diperlukan dalam masyarakat. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan dialog adalah upaya pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan terkait dengan kebutuhannya dan selanjutnya pemerintah daerah menjawab atau menjelaskan tentang keadaan sesungguhnya. Proses ini sesungguhnya merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan secara bersama.

Dengan dialog memungkinkan kesempatan untuk mengurangi kesenjangan yang ada, dan meluruskan kembali perbedaan yang terjadi sehingga menjadi selaras dan menuju kepada tujuan yang sama. Pemerintah daerah dapat berkonsultasi tentang rencana maupun program yang akan dikerjakan sedangkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kebutuhannya

yang paling urgen dibutuhkan dalam pembangunan.

Untuk menjangkau dan menyaring program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ditempuh melalui diskusi kelompok terfokus. Bukan suara terbanyak yang menjadi kriteria penentuan dari suatu program, dalam menentukan prioritas program pembangunan harus digunakan kriteria terukur. Dalam proses komunikasi dan diskusi dalam kelompok masyarakat adalah kesepakatan dari semua peserta.

Informasi diatas didukung dengan hasil penjangkauan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa anggota masyarakat dan juga para kepala kampung yang memiliki sebaran tanaman pala terbanyak. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Wahidin Wayati, salah seorang masyarakat distrik fakfak barat sebagai berikut : *“selama ini kami belum melihat adanya dialog yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah khususnya membahas menyangkut pala. Biasanya aparat yang datang itu kalau ada pemilu atau dari kesehatan untuk penjelasan menyangkut posyandu anak-anak. Jarang sekali aparat datang untuk mengecek tanaman pala atau hasil-hasil panen kami”*.

Membuka Jalur Informasi dan Akses Yang Diperlukan

Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa *website* sebagai jendela publikasi pemerintah daerah belum berfungsi menyediakan data dan informasi bagi masyarakat fakfak dan juga bagi dunia luar. Adapun data yang ditampilkan belum lengkap dan tidak bersifat info kekinian fakfak artinya tidak di update setiap hari atau waktu mengenai informasi fakfak. Dalam kaitan dengan akses medan atau wilayah yang ada di pelosok kampung, terlihat masih menggunakan jalan setapak sehingga untuk bisa mengangkut hasil panen pala tersebut masyarakat melakukannya secara berbondong-bondong dan dalam waktu yang cukup lama hingga berhari-hari. Infrastruktur jalan masuk perkampungan disetiap pelosok distrik belum mendukung sehingga akses kendaraan pun belum dirasakan oleh masyarakat.

Untuk informasi pasar yang berhubungan dengan perkembangan harga jual maupun harga beli komoditas termasuk pala oleh pemerintah daerah dilakukan dengan menyiarkan melalui berita diradio. Namun sebagian wilayah pelosok tidak mendapatkan akses informasi lewat radio tersebut. Masyarakat biasanya memperoleh informasi lewat keluarga atau sanak saudaranya yang berkunjung ke kota fakfak.

Adapun banyaknya penerangan umum siaran RRI Fakfak menurut macam siaran perbulan dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7
Banyaknya Penerangan Umum Siaran RRI Fakfak menurut macam siaran perbulan periode 2014

No	Bulan	Nama Siaran dan Banyaknya Siaran yang dilakukan					
		Ruang tanya jawab	Pidato radio	Radiogram	Sapta marga	Obrolan	Berita interaktif
1	Januari	-	-	41	-	-	-
2	Februari	-	-	27	-	-	-
3	Maret	-	-	24	-	-	-
4	April	-	-	52	-	-	-
5	Mei	-	-	36	-	-	-
6	Juni	-	-	52	-	-	-
7	Juli	-	-	20	-	-	-
8	Agustus	-	-	50	-	-	-
9	September	-	-	20	-	-	-
10	Oktober	-	1	45	-	-	-
11	November	-	2	98	-	-	-
12	Desember	-	2	37	-	-	-

Sumber : fakfak dalam angka tahun 2014

Selanjutnya akses siaran yang dapat memberikan berita dan informasi dari RRI fakfak tentang lokal maupun nasional termasuk

berita ekonomi dan keuangan untuk dipergunakan masyarakat fakfak termasuk para petani pala dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8
Banyaknya Berita / Informasi RRI Fakfak Periode 2014

No	Bulan	Nama Siaran dan Banyaknya Siaran yang dilakukan					
		Relay Jakarta / Berita Umum	RRI Fakfak / Berita Lokal	Berita Khusus			
				Berita Olahraga	Siaran Langsung	Seraba-serbi Olahraga	Berita Ekonomi Keuangan
1	Jauari	206	53	-	4	-	30
2	Februari	263	52	-	3	-	24
3	Maret	298	50	-	3	-	30
4	April	233	50	-	2	-	30
5	Mei	298	54	-	4	-	31
6	Juni	290	52	-	4	-	30
7	Juli	290	52	-	2	-	30
8	Agustus	268	54	-	8	-	27
9	September	256	50	-	3	-	16
10	Oktober	289	54	-	4	-	16
11	November	313	51	-	7	-	30
12	Desember	262	54	-	10	-	20
	Jumlah	3266	626	-	54	-	314

Sumber : kabupaten fakfak dalam angka tahun 2014

Dari tabel 8 dan 7 terlihat bahwa masih belum ada berita interaktif dan belum ada tanya jawab untuk akses informasi dan komunikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana penyampaian pesan, sementara dalam kaitan dengan berita lokal dan berita ekonomi keuangan sudah hampir setiap hari ditampilkan kecuali pada bulan september dan oktober dilakukan sekali dalam dua hari.

Menciptakan Instrumen Peraturan dan Pengaturan Mekanisme Pasar

Hasil pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa aktivitas petani pala antara masyarakat etnis papua dan masyarakat pendatang lainnya (transmigran) memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Adanya polarisasi dalam budaya bertani dan berkebun termasuk dalam mengolah komoditas pala. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ketrampilan dan pemahaman. Etnis pendatang (transmigran) yang memiliki ketrampilan dan penguasaan teknik bertani modern dan telah memiliki orientasi ekonomi dan agribisnis. Sebaliknya etnis papua masih berorientasi pada kegiatan subsistem dimana motivasi ekonomi masih rendah, budaya bertani bersifat komunal yang di kontrol oleh norma dan tata adat setempat, dan keterkaitan yang kuat antara individu petani dengan lahan serta kelembagaan adat.

Selanjutnya berkaitan dengan peran pemerintah dalam peraturan mekanisme pasar yang adil dan mengkomodir kepentingan masyarakat lokal yang lemah, maka dilakukan wawancara dengan

bapak Sulistyو Budi, kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten fakfak dengan informasi sebagai berikut : *“mengenai pengaturan sistem penjualan dan pembelian barang komoditas petani selama ini memang belum ada aturan yang jelas. Namun melihat banyaknya keluhan warga dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka kami menyiapkan rancangan peraturan sebagai landasan bagi petani maupun siapa saja yang mengelola komoditas-komoditas di fakfak ini”*.

Informasi ini didukung dengan pernyataan salah seorang anggota DPRD dari Distrik Teluk Patipi sebagai berikut : *“Kita telah merespon kondisi yang ada dan kenyataan yang terjadi dilakangan petani, berbagai keluhan tentang adanya praktik-praktik seperti itu, namun selama ini memang kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang belum ada aturan yang jelas oleh karena itu kami di dewanpun mendesak agat pemerintah daerah segera menciptakan regulasi yang baik sehingga bisa menjamin hak-hak masyarakat tersebut”*.

Dengan demikian maka dari deskripsi wawancara yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa selama ini belum ada regulasi kebijakan yang jelas secara tertulis, yang bisa mengatur dan bisa menjadi pedoman dasar bagi petani lokal maupun transmigran serta pengusaha yang ada.

Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Pala

Hambatan Kultural

Dalam kaitan dengan hambatan kultural maka terdapat sejumlah unsur yang menjadi landasan berpijak dan sebagai parameter. Adapun unsur yang dipakai dalam melihat hambatan-hambatan umum pemberdayaan petani pala meliputi struktur kelembagaan, norma dan adat istiadat, toleransi sosial dan fungsi kepemimpinan. Dengan memanfaatkan informasi hasil pengamatan dan hasil wawancara serta berpedoman pada landasan teoritis yang ada maka deskripsi rinci keseluruhan aspek diatas dapat diuraikan kedalam beberapa hambatan kultural yang acapkali berlawanan dengan kegiatan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan, yaitu antara lain sebagai berikut:

Sikap dan Perilaku Masyarakat

Adanya suatu sikap yang membanggakan dan mempertahankan tradisi-tradisi lama, dari suatu masyarakat akan berpengaruh pada terjadinya proses perubahan. Karena adanya anggapan bahwa perubahan yang akan terjadi belum tentu lebih baik dari yang sudah ada.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kajian yang dilakukan dengan memanfaatkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan menemukan bahwa masyarakat etnis papua yang ada di setiap distrik di Kabupaten Fak-Fak sebagian besar cenderung ragu mengikuti langkah-langkah program yang diterapkan pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Informasi ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, Bapak Ahmad Hombore, penyuluh pertanian dan perkebunan distrik fak-fak barat sebagai berikut: *“memang agak susah kalau kita mau memberikan penyuluhan atau sosialisasi program atau kegiatan di masyarakat perkampungan pelosok. Ada sebagian masyarakat yang belum mau menerima hal-hal baru. Ada yang malas karena memang menganggap kebiasaan lama yang dijalankannya sudah cukup baik. Mental masyarakatnya memang rata-rata malas bekerja dan suka hura-hura. Dan itu hampir terjadi disemua perkampungan yang kami kunjungi”*.

Gambaran kondisi tersebut menguatkan kendala yang ditemukan dalam pemberdayaan petani

pala. Sikap masyarakat yang demikian membuat sulitnya merubah tingkat kesejahteraan mereka, sementara keinginan untuk maju belum diperoleh dari rasa hati masyarakat sendiri.

Inovasi baru yang belum dipahami

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis kajian yang dilakukan terlihat bahwa rasa penolakan terhadap inovasi baru yang belum dipahami tersebut menyebabkan lambatnya proses pembangunan dan pemberdayaan terhadap petani pala. Adanya kesulitan untuk mengembangkan program-program baru yang sifatnya memberdayakan masyarakat untuk bisa hidup lebih baik. Akibatnya aparat lapangan yang bertugas pun sampai pada tingkat jenuh dan membiarkan keadaan tersebut berjalan begitu saja. Adapun sikap penolakan masyarakat etnis lokal papua tersebut dilakukan dengan tidak menghadiri undangan ataupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan, merusak alat-alat serta sarana dan prasarana pertanian lainnya yang dipergunakan dalam mendukung kebijakan inovasi tersebut. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap koordinator penyuluh lapangan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Anggota kami yang bertugas kelapangan rata-rata mengalami keluhan yang sama, terutama kalau mereka ingin memperkenalkan teknologi atau dalam kaitan dengan inovasi baru yang ingin merubah cara bertani dan juga bagaimana masyarakat bisa mengolah hasil panennya secara berkualitas. Mereka menemukan penolakan yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tersebut. Bahkan ada sebagian yang merasa terganggu dan mengancam anggota kami.

Pada prinsipnya sikap penolakan masyarakat terhadap inovasi dan kreasi baru yang ditampilkan baik teknologi maupun cara kerja lebih disebabkan karena sebagian masyarakat belum memahami manfaat dan keuntungan yang akan diperolehnya. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang warga masyarakat dari Distrik Kokas diperoleh informasi sebagai berikut:

Anggapan Masyarakat Terhadap Institusi Lokal/ Tradisi Hukum Adat

Hasil wawancara terhadap beberapa informan diperoleh gambaran yang hampir sama menjelaskan kondisi bahwa masyarakat fak-fak

pada umumnya patuh dengan nilai adat yang ada sedangkan bagi etnis pendatang sebagian sudah lebih rasional lagi dalam memandang nilai-nilai yang ada.

Dengan demikian maka hambatan kultural yang dipandang dari aspek angapan masyarakat terhadap institusi lokal atau tradisi adat dapat memiliki pengaruh yang besar selama populasi etnis papua (lokal) yang ada masih belum terkontaminasi dengan nilai baru yang bisa diterima mereka. Ada kemungkinan untuk melakukan perubahan sebagai langkah solutif tersebut adalah nilai baru dapat diterima manakala masyarakat tersebut sudah memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi sehingga tingkat rasionalitasnya pun meningkat.

Tokoh-Tokoh Adat

Aspek lainnya yang mempengaruhi hambatan kultural yang ditemukan adalah peran tokoh-tokoh adat. Sebagai masyarakat dengan etnis yang menjunjung hirarki sosial, peran tokoh sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan sosial lingkungan setempat. Tokoh-tokoh adat memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan dilingkungan kampung atau kelompok sukunya. Mereka yang memberikan nilai-nilai kehidupan dan mengatur tentang perilaku hubungan sosial maupun interaksi masyarakat setempat.

Inisiatif Para Generasi Muda

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam pergaulan keseharian dikalangan generasi muda yang ada di kampung maupun wilayah distrik setempat, kecenderungan monopoli dan rasa angkuh yang ditampilkan oleh generasi muda dari kalangan ningrat sehingga menghambat inovasi dari generasi muda lainnya. Meskipun generasi muda dari kalangan bawah yang memiliki pengetahuan lebih dan mampu mengembangkan sesuatu tetapi dia harus tunduk dan terikat oleh pengaruh adat yang menghendaki tunduk pada kalangan ningrat tersebut.

Dengan demikian maka proses pemberdayaan mengalami hambatan sebagai akibat dari perilaku tersebut di atas. Kalangan generasi muda terutama etnis lokal papua yang masih memiliki ikatan tradisi hirarkis dalam pergaulan kelompok sosial masyarakat mempengaruhi keberadaan generasi muda lainnya sehingga mematikan pula daya inovatif dan kreativitas untuk bisa menjadi lebih baik. Kebijakan dan

program pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya sendiri mengalami sambutan dengan sikap apatis dan skeptis.

Sebagai langkah memperoleh informasi yang akurat dari informan maka dilakukan wawancara terhadap kalangan generasi muda terhadap bagaimana sikap dan inisiatif generasi muda yang ada. Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang pemuda dari kalangan keturunan kepala suku kokaerlus diperoleh informasi sebagai berikut: *“Selama ini saya di rumah saja, biasanya tiap hari kami bermain dengan teman-teman, walaupun membantu biasanya membantu orang tua dirumah tapi kerjaan yang ringan-ringan. Saya tidak pernah keluar kampung atau ketempat jauh karena bapak saya dan ibu saya tidak mengijinkan. Kalau kebutuhan saya memang selama ini terpenuhi semua”*.

Untuk bisa membandingkan hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan salah seorang pemuda dari kalangan etnis pendatang diperoleh informasi sebagai berikut: *“Selama ini saya menempuh pendidikan diluar daerah, bahkan hampir 2 atau 3 tahun saya biasanya keluar daerah untuk memasarkan hasil komoditas kami yang ada dirumah. Kebetulan banyak teman-teman saya dari luar banyak yang menawarkan barang kami”*

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Pala di Kabupaten Fakfak

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani pala oleh pemerintah kabupaten fakfak meliputi beberapa aspek yaitu 1) Memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, 2) Membangun partisipasi rakyat, 3). Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, 4) Membuka dialog dengan masyarakat, 5) Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri, 6) Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar

- a. Memahami Aspirasi Rakyat
- b. Membangun Partisipasi Masyarakat
- c. Menyiapkan Masyarakat dengan Sebaiknya
- d. Membuka Dialog dengan Masyarakat
- e. Membuka Jalur Informasi dan Akses yang Diperlukan

- f. Menciptakan Instrumen Peraturan Mekanisme Pasar

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis kajian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani pala di kabupaten Fak-fak dari keenam aspek yang dikaji secara keseluruhan belum optimal dijalankan kepada semua distrik dan kampung, sebagian program masih belum menyentuh masyarakat pelosok sehingga petani pala belum hidup sejahtera dari hasil komoditasnya, belum adanya regulasi yang jelas termasuk juga dengan mekanisme pemasaran sehingga masih terjadi praktek negatif dalam perniagaan di kabupaten Fak-fak khususnya di kampung dan pelosok distrik.
2. Hambatan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan petani pala di Kabupaten Fak-Fak berdasarkan pengkajian yang dilakukan secara umum meliputi hambatan kultural dan hambatan masyarakatnya sendiri. Adapun hasil temuan dari masing-masing hambatan kultural dan hambatan masyarakat tersebut sebagai berikut:
 - a) *Hambatan Kultural*; terhadap upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di Kabupaten Fak-Fak dari aspek yang berkaitan dengan unsur ini ditemukan bahwa:
 - 1) Sikap dan perilaku masyarakat etnis lokal papua di distrik dan kampung yang cenderung ragu dan menolak program baru yang diterapkan pemerintah daerah.
 - 2) Inovasi yang belum dipahami yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat fak-fak terutama di pelosok distrik dan kampung.
 - 3) Anggapan masyarakat terhadap Institusi Lokal/Tradisi Hukum Actet terutama etnis lokal papua yang memandang kebiasaan dan tradisi yang dipertahankannya adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah.

- 4) Tokoh-Tokoh Adat yang cenderung mempertahankan nilai-nilai lama yang diwariskan leluhurnya dan menentang nilai baru yang masuk sehingga mempengaruhi masyarakat lainnya.
- 5) Inisiatif para generasi muda kabupaten fak-fak yang belum mendukung pembangunan serta kecenderungan monopoli dan rasa angkuh yang ditampilkan oleh generasi muda dari kalangan ningrat sehingga menghambat inovasi dari generasi muda lainnya.

- b) *Hambatan Masyarakat*: terhadap upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani pala di Kabupaten Fak-Fak ditemukan dua unsur yang berperan yaitu :
 - 1) Ketakutan masyarakat akan gagal terhadap program baru yang diterapkan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh pengalaman kegagalan pelaksanaan program pada masa lalu.
 - 2) Kondisi petani pala saat ini dianggap sudah memuaskan mereka dan dianggap kehidupan saat ini sudah cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh pola hidup terisolir dan kekurangan referensi mereka terhadap dunia luar.

Saran

Agar masyarakat petani pala dapat diberdayakan dan peran pemerintah kabupaten fak-fak dioptimalkan sehingga memberikan hasil nyata terhadap pemberdayaan demi kesejahteraan petani dan tidak menemui hambatan yang signifikan maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif terhadap semua komponen masyarakat termasuk tokoh adat dan kepala kampung dan juga generasi muda yang ada tentang keunggulan dan manfaat pala fak-fak bagi kesejahteraan mereka.
2. Mengingat belum adanya aturan yang berkaitan dengan pengolahan pala dan standar pemasaran yang jelas maka pemerintah daerah perlu membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah

atau peraturan bupati sehingga dapat mengatur masyarakat dan melindungi hak-hak petani etnis lokal. Pemerintah daerah pun harus menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi sehingga bisa digunakan untuk promosi. Dengan demikian hasil temuan aspek kajian penting di atas dapat menjadi kerangka acuan pemerintah daerah dalam memetakan arah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat fak-fak khususnya petani pala.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2004). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiman, Arief. (1996). *Konsep Kedaulatan dan Negara*. Jakarta : PT. Dharma Karsa Utama.
- Bookman, Ann dan Morgen, Sandra. (1998). *Women and Politics of Empowerment*. Philadelphia: Temple University.
- Hidaya Zuliadi. (1997). *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hikmat, Harry. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Humaniora*. Bandung: Utama Press.
- Mac Iver, RM. (1992). *Jaring – jaring Pemerintahan-Jilid II*. Laila Hasyim (Terj). Jakarta : Aksara Baru.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, D, Riant. (2002). *Reinventing Indonesia (Menata Ulang Manajemen Pemerintahan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global)*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Nuryanti. (2004). *Pemberdayaan Petani Melalui Model Cooperative Farming*
- Oentarto, dkk. (2004). *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta : Samitra Media Utama.
- Pamudji S. (1980). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak 1972 s/d 1995.
- Poerwadarminta. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyid, Ryaas, M. (1999). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Rathgeber, Theodor. (2006). *Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya di Papua Barat*, PT Pustaka Sinar Harapan.
- Rumbiak Peter Yan. (2005). *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Papua International Education.
- Rusidi. (2002). *Metodologi Penelitian, Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian PPS.MAPD STPDN*.
- Sadu Wasistiono. (2001). *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alqa Print.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah (Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekamto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, Edi. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat, memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhendra K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Astrid. (1974). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta Persada.
- Suseno, Frans Magnis. (1991). *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Surbakti, Ramlan. (2000). *Politik Desentralisasi dan Demokratisasi*. Jakarta: IIP.
- Syaukani, dkk. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. (1983). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Uswanas. (2003). *Peran Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam Pemberdayaan Petani Pala*